

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini tengah berfokus pada seluruh aspek upaya pembangunan ekonomi nasional dan laju pertumbuhan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi mampu dijadikan sebagai suatu ukuran guna melihat tingkat pembangunan serta dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam menjalankan pembangunan. Meningkatnya suatu pembangunan mencerminkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi membutuhkan pembiayaan yang besar, sehingga solusi dalam hal tersebut adalah dengan kegiatan penanaman modal yang akan menghasilkan investasi penambah stok modal. Bertambahnya stok modal dapat meningkatkan produktivitas, kapasitas serta kualitas produksi yang dapat bersaing di pasar dunia. Investasi mampu mendorong tercapainya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara (Ain, 2021). Pembentukan investasi memegang strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi bukan hanya memberikan tambahan modal, tetapi mampu membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas basis produksi, serta mendorong terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan adanya dukungan investasi, pertumbuhan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. (Ernita et al., 2013).

Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat diperlukan di berbagai wilayah Indonesia guna mempercepat pembangunan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan pembelanjaan modal untuk pengadaan barang modal, bahan baku serta perlengkapan produksi guna meningkatkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa sehingga menghasilkan keuntungan di masa mendatang (Hayati, 2016). Penanaman modal menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan investasi baik investasi PMDN maupun PMA guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang selanjutnya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga

pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nugroho et al., 2024).

Investasi mulai mengalami perkembangan sejak era Revolusi Industri pada tahun 1760 dan dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang diterbitkan pada tahun 1776. Adam Smith menekankan pentingnya modal dalam pembangunan ekonomi, modal adalah syarat mutlak untuk mencapai sebuah kemakmuran. Adam Smith berpandangan bahwa sebuah negara kaya adalah negara yang dihuni oleh warga yang bekerja produktif untuk memperbaiki diri dan memenuhi kebutuhan finansial. Seseorang individu atau kelompok akan menginvestasikan kekayaannya pada usaha yang paling mungkin membantu mereka untuk mendapatkan pengembalian tertinggi dengan risiko yang sesuai. Adam Smith menekankan bahwa faktor utama dalam menunjang perekonomian meliputi persaingan usaha yang sehat, kebijakan pemerintah, serta bisnis manajemen bisnis yang baik. Pemenuhan kebutuhan investasi dan tabungan berfungsi sebagai modal serta mesin penghemat tenaga kerja yang dapat meningkatkan standar produksi perusahaan yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (Butler, 2011)

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan aliran investasi, tidak hanya investasi domestik melainkan juga investasi luar negeri yang berperan besar dalam melengkapi kekurangan modal domestik. *Foreign Development Investment* (FDI) mampu mendorong peningkatan produksi dan menjadi jalur masuknya pemenuhan teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Masuknya investasi luar negeri akan meningkatkan produktivitas produksi perusahaan disertai dengan transfer teknologi yang masuk ke dalam negeri (Nugroho et al., 2024).

Realisasi Investasi merupakan tindakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang telah dijalankan dalam suatu periode tertentu untuk meningkatkan perekonomian suatu daerah atau negara. Investasi dapat berupa pembelian saham, pendirian perusahaan, atau proyek lainnya. Investasi bermanfaat guna pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia yang sangat luas. Investasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu investasi finansial dan investasi non finansial. Investasi finansial merupakan penempatan dana dalam berbagai instrumen keuangan, seperti uang tunai, tabungan, deposito,

modal dan penyertaan, surat berharga, obligasi, serta instrumen sejenis lainnya. Sementara itu, investasi non finansial mencakup investasi dalam bentuk aset fisik atau modal berwujud, termasuk di dalamnya barang modal dan persediaan (Firdaus & Widyasastrena, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pembangunan wilayah di suatu negara atau wilayah. Pengukuran IPM terbagi menjadi tiga indikator utama, yaitu pendidikan (Angka melek huruf dan angka lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup), dan pengeluaran Rill per kapita yang dilihat pada pembangunan di suatu daerah (Badan Pusat Statistik). IPM menggabungkan beberapa indikator kunci untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan manusia, IPM menjadi alternatif yang lebih holistik dan manusiawi daripada produk domestik bruto (PDB) untuk mengukur kemajuan suatu negara (Baru, 1998). IPM dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu daerah. Peningkatan IPM secara tidak langsung mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Daerah dengan IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain cenderung lebih menarik bagi investor karena ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hal ini menggambarkan kualitas manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi.

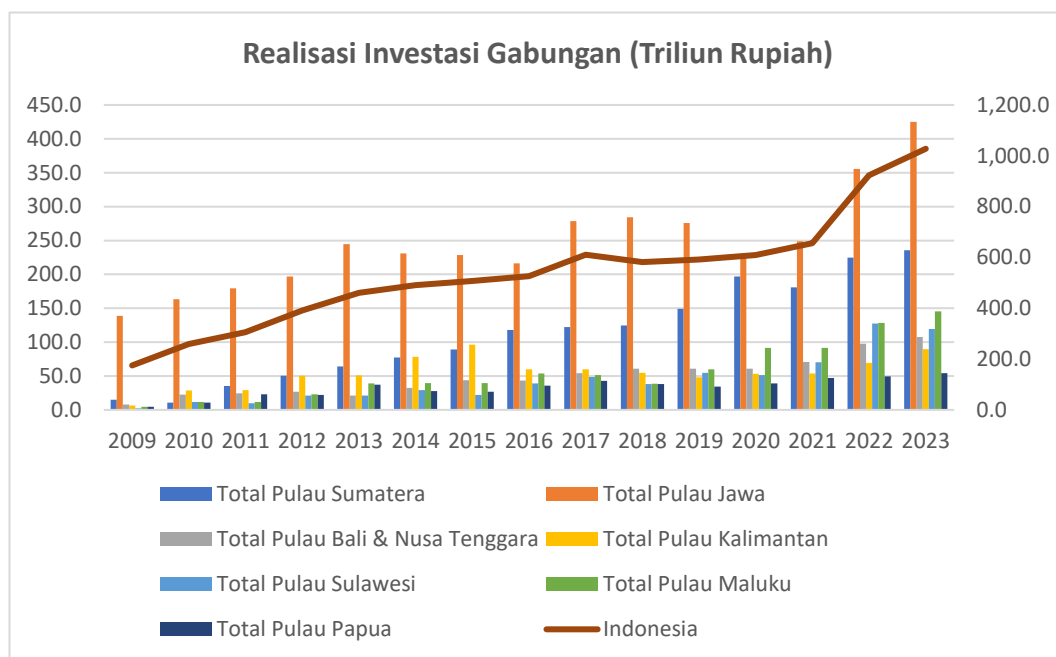
Inflasi merupakan suatu kondisi pada saat harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat diukur dalam perubahan indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Kenaikan harga barang dan jasa pada saat inflasi dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang meningkat signifikan namun penawaran cenderung rendah atau pada saat biaya produksi meningkat. Inflasi yang tak terkendali dapat membuat kepercayaan masyarakat kepada uang semakin menurun dan akan menyebabkan masyarakat sesegera mungkin untuk menggunakannya dengan membelikan barang atau investasi dalam aset rill. Inflasi merupakan faktor penting yang mencerminkan stabilitas harga di suatu wilayah. Inflasi yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan biaya produksi dan ketidakpastian ekonomi, yang pada akhirnya dapat menurunkan minat investor. Sebaliknya,

tingkat inflasi yang terkendali menunjukkan kondisi ekonomi yang sehat dan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan suatu standar upah bulanan terendah yang berlaku di setiap provinsi dan ditetapkan oleh gubernur setiap tahun. UMP merupakan jaring pengaman guna memastikan pekerja memperoleh penghasilan minimum yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. UMP ditetapkan setiap tahun dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi, kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dengan adanya UMP, pekerja diharapkan dapat meningkatkan standar hidup dan keamanan finansial mereka, serta memiliki daya beli yang lebih baik. Kenaikan upah minimum bertujuan guna memenuhi kehidupan yang layak serta meningkatkan konsumsi masyarakat (Islami Nadia & Anis Ali, 2019). UMP berperan penting dalam menentukan biaya tenaga kerja di suatu daerah. Perubahan tingkat UMP dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, namun pada saat yang sama berpotensi menambah beban biaya produksi bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya, karena struktur upah merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan biaya operasional perusahaan.

Tingkat Pengangguran merupakan salah satu indikator utama yang digunakan dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran yang relatif besar mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara, karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja (I. komang A. A. Putra & Arka, 2016). Tingkat pengangguran mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang dapat memengaruhi daya tarik investasi. Investor cenderung mempertimbangkan stabilitas pasar tenaga kerja sebelum menanamkan modal, karena dengan adanya tenaga kerja produktif dapat menunjang keberlangsungan usaha (Helvira & Rizki, 2020). Tingkat Pengangguran dipilih karena mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja dan efisiensi perekonomian daerah. Penurunan tingkat pengangguran mampu menunjukkan bahwa sumber daya manusia telah terserap

dengan baik dalam kegiatan ekonomi, sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan daya tarik investasi. Sebaliknya, peningkatan tingkat pengangguran dapat menjadi indikasi lemahnya permintaan tenaga kerja dan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat menghambat investasi baru.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 1. Grafik Realisasi Investasi Gabungan Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, Kalimantan, Bali & Nusa Tenggara, Indonesia Tahun 2009-2023 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan gambar 1, realisasi investasi gabungan Pulau Sumatera menempati posisi kedua tertinggi setelah Pulau Jawa. Pada tahun 2009, total investasi di Pulau Sumatera mencapai 15,1 Triliun Rupiah, jauh lebih kecil dibandingkan Pulau Jawa yang mencapai 139 Triliun Rupiah. Kontribusi Investasi Pulau Sumatera tetap cukup signifikan jika dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah utama tujuan investasi setelah Pulau Jawa.

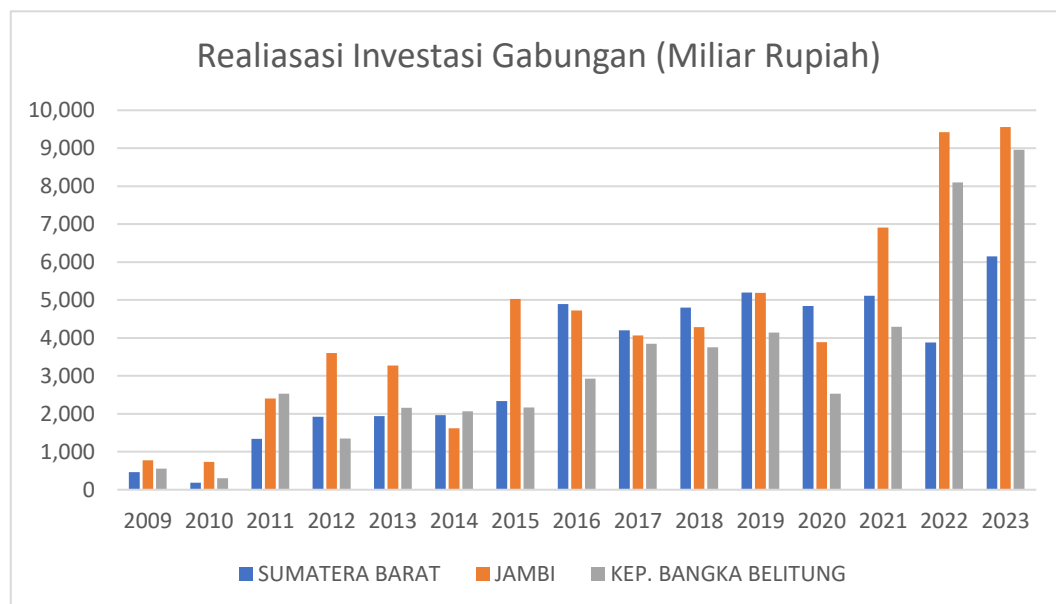
Investasi di Pulau Sumatera menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif, namun secara umum mengalami peningkatan. Dari 15,1 Triliun Rupiah pada tahun 2009, angka ini naik menjadi 197 Triliun Rupiah pada 2020, kemudian sempat menurun menjadi 181 Triliun Rupiah pada 2021, sebelum kembali meningkat hingga mencapai 235,6 Triliun Rupiah pada tahun 2023. Pencapaian ini

menegaskan posisi Pulau Sumatera yang konsisten berada di urutan kedua tertinggi dalam hal realisasi investasi nasional, hanya kalah dari Pulau Jawa. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di luar Jawa, Pulau Sumatera memiliki daya tarik investasi yang relatif lebih besar. Misalnya, pada tahun 2023 Pulau Kalimantan, hanya mencatat 155,8 Triliun Rupiah, sementara Sulawesi sebesar 152 Triliun Rupiah, dan Bali-Nusa Tenggara 60,5 Triliun Rupiah. Dengan capaian 235,6 Triliun Rupiah, Pulau Sumatera berhasil menjaga gap yang cukup lebar dengan wilayah-wilayah lain, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur penunjang, dan posisi geografis strategis masih menjadi daya tarik utama bagi investor. Investasi dapat berperan sebagai salah satu pendorong utama aktivitas perekonomian daerah yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Ramadhan et al., 2021).

Secara keseluruhan, dari tahun 2009 hingga 2023, Pulau Sumatera selalu konsisten berada di posisi kedua terbesar setelah Pulau Jawa dalam hal penerimaan realisasi investasi. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun konsentrasi investasi nasional masih terpusat di Pulau Jawa, Pulau Sumatera tetap menjadi salah satu kawasan kunci bagi pengembangan investasi nasional. Investor memerlukan kejelasan dan kemudahan dalam melakukan prosedur penanaman modal. Besarnya investasi yang akan masuk ke suatu daerah ditentukan oleh tingkat daya tarik yang dimiliki suatu daerah tersebut terhadap investasi (Sulistyowati et al., 2018). Keberhasilan suatu daerah dalam mendorong daya tarik investasi ditentukan tergantung pada kemampuan daerah untuk menetapkan faktor-faktor yang digunakan sebagai penentu daya saing perekonomian daerah. Pemerintah daerah harus memiliki perencanaan yang baik guna mengembangkan daerahnya sebagai tujuan investasi.

Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi yang terletak di pulau Sumatera. Perkembangan realisasi investasi di 3 provinsi tersebut cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2009 hingga 2023. Secara rata-rata realisasi investasi di provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung 2009 hingga 2023 menempati posisi sepuluh terendah secara nasional sebelum adanya pemekaran wilayah di Papua menjadi enam provinsi pada

tahun 2022, dengan masing-masing rerata investasi sejumlah 1.501,5 Miliar Rupiah, 29.744,7 Miliar Rupiah dan 9.370,8 Miliar Rupiah. Kondisi ini menjadi perhatian karena, meskipun berada di peringkat rendah secara nasional, jika dilihat dari perspektif pulau, Pulau Sumatera menempati posisi kedua tertinggi tingkat realisasi investasi dibandingkan pulau lainnya. Pemilihan ketiga provinsi ini sebagai objek penelitian didasarkan pada kombinasi faktor tersebut, rendahnya realisasi investasi nasional membuka peluang analisis mendalam mengenai kendala dan faktor-faktor yang memengaruhi investasi, sedangkan posisi Pulau Sumatera yang relatif tinggi menunjukkan adanya variabel regional yang dapat memengaruhi keberhasilan realisasi investasi.



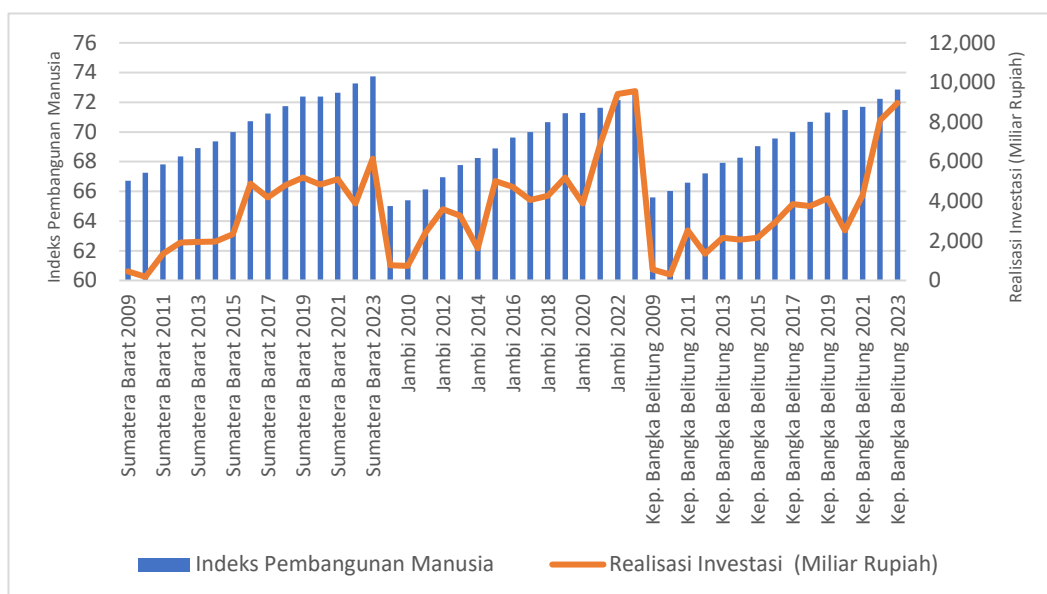
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 2. Grafik Realisasi Investasi di Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023 (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 2, provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2009 hingga 2023, secara umum menunjukkan adanya tren peningkatan investasi dari tahun ke tahun, meskipun dengan fluktuasi di beberapa periode. Pada tahun 2009 dan 2010 nilai realisasi investasi di ketiga provinsi masih berada dibawah 1 triliun rupiah. Namun, sejak tahun 2011 hingga 2015, investasi mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Provinsi Jambi menjadi salah satu daerah yang mengalami lonjakan paling tinggi, dengan

realisasi investasi mencapai 5.025,9 Miliar Rupiah pada tahun 2015, sementara Sumatera Barat mencapai 2.304,2 Miliar Rupiah dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai 2.164,5 Miliar Rupiah. Realisasi investasi di Jambi mencapai yang tertinggi diantara provinsi lainnya yaitu pada tahun 2023 dan 2022 sebesar 9.561,2 Miliar Rupiah dan 9.423,5 Miliar Rupiah. Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi tertinggi kedua dengan tingkat realisasi investasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 8.961,5 Miliar Rupiah. Realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat mencapai yang tertinggi tahun 2023 sebesar 6.153,3 Miliar Rupiah. Peningkatan investasi terjadi karena stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, dan kebijakan pemerintah serta regulasi yang sehat sehingga memberikan keyakinan kepada investor terkait investasi yang akan dilakukan (Dewi & Cahyono, 2016).

Realisasi investasi ketiga provinsi tersebut selalu mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Provinsi Jambi merupakan provinsi yang memperoleh tingkat realisasi investasi tertinggi secara rata-rata diantara provinsi lainnya. Penyebab dari menurunnya realisasi investasi terdapat pada beberapa hal salah satunya adalah ketidakpastian politik. Indonesia menerapkan sistem demokrasi dimana pada setiap lima tahun sekali terjadi pemilihan umum presiden yang tentunya dapat mempengaruhi investor luar negeri. Penyebab lainnya adalah karena adanya pandemi covid-19 yang mengganggu perekonomian di seluruh negara termasuk Indonesia, semua negara berfokus untuk memulihkan kondisi perekonomian negaranya sendiri dan berfokus pada bidang kesehatan sehingga investasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan tingkat investasi berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan adanya penurunan realisasi penanaman modal (Ernita et al., 2013).



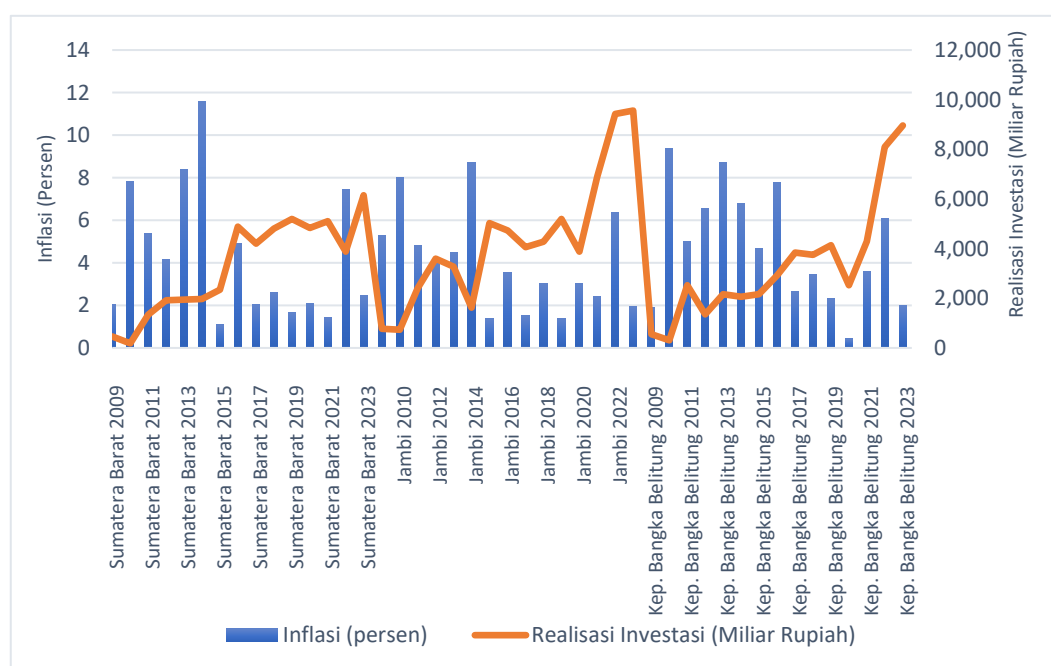
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 3. Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023

Berdasarkan gambar 3, Indeks Pembangunan Manusia pada ketiga provinsi tersebut menunjukkan pola peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai tertinggi pada tahun 2023. Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 66,72 pada tahun 2009 menjadi 73,75 pada tahun 2023. Provinsi Jambi juga memperlihatkan tren peningkatan yang serupa. IPM Jambi meningkat dari 65 pada tahun 2009 menjadi 72,77 pada tahun 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut mengalami perkembangan yang positif, pada tahun 2009 memperoleh 65,5 meningkat menjadi 72,85 pada tahun 2023. Nilai IPM terendah di ketiga provinsi tersebut terjadi pada tahun 2009.

Peningkatan IPM tidak mempengaruhi tingkat realisasi investasi untuk tetap naik. Kenaikan IPM Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung yang terbilang cukup konsisten dan hanya Sumatera Barat yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Peningkatan IPM dipengaruhi oleh tiga indikator utama yaitu pendidikan yang dapat dilihat dalam angka partisipasi sekolah, kesehatan yang dapat dilihat pada angka harapan hidup, dan pengeluaran riil per kapita. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingginya IPM suatu provinsi tidak selalu diikuti dengan meningkatnya realisasi investasi, begitu pula sebaliknya. Misalnya, Sumatera Barat memiliki IPM tertinggi, namun realisasi investasinya

justru relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain. Sebaliknya, Provinsi Jambi yang memiliki tingkat IPM yang masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya mampu mencatatkan realisasi investasi yang lebih besar. Fenomena ini penting untuk dianalisis lebih lanjut guna memahami keterkaitan antara pembangunan manusia dan masuknya investasi, serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhinya. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia menjadi faktor utama daya tarik suatu daerah bagi investor dalam menanamkan modalnya, bertumbuhnya tingkat pendidikan mampu meningkatkan minat investasi pada daerah tersebut (Noviansyah et al., 2019).

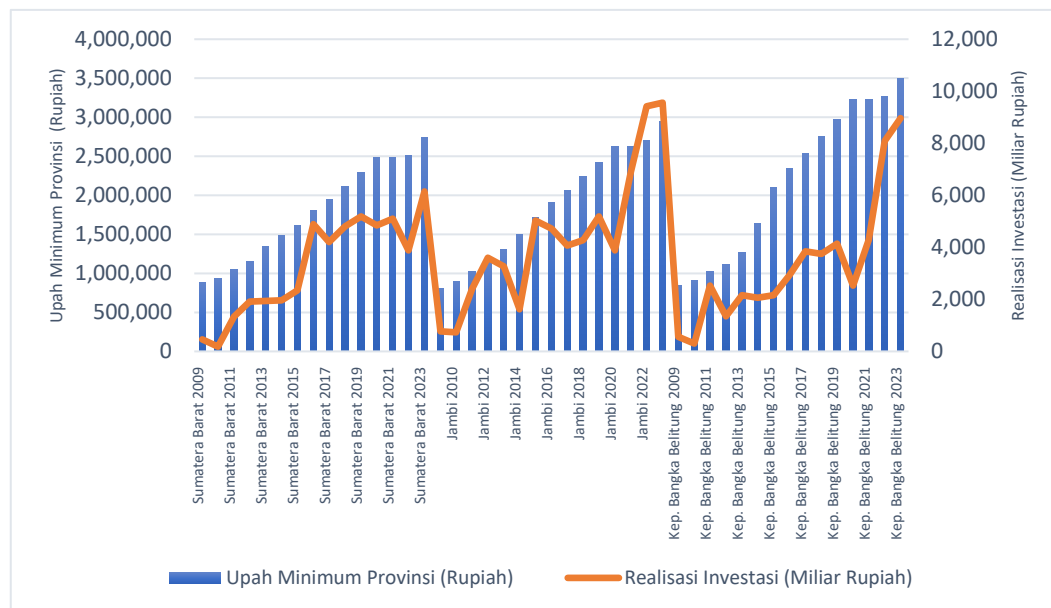


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 4. Grafik Inflasi di provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023

Berdasarkan gambar 6, Inflasi di ketiga provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami fluktuasi. Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi cukup tajam, pada tahun 2009 inflasi sebesar 2,05 persen, namun sempat meningkat menjadi 11,58 persen pada tahun 2014, yang merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 15 tahun. Kemudian, inflasi cenderung menurun dan relatif stabil di bawah 3 persen hingga tahun 2021, sebelum kembali naik menjadi 7,43 persen pada 2022 dan menurun lagi ke 2,47 persen pada 2023. Provinsi Jambi juga mengalami pola inflasi yang berfluktuasi. Inflasi

tertinggi tercatat pada tahun 2014 sebesar 8,72 persen, kemudian menurun signifikan menjadi 1,37 persen pada 2015. Pada tahun 2022, inflasi sempat meningkat ke 6,35 persen, sebelum kembali turun menjadi 1,96 persen pada 2023. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan kondisi inflasi yang juga berfluktuasi cukup besar. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 9,36 persen dan 2016 sebesar 7,78 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi pada 2020 sebesar 0,44 persen. Secara rata-rata pada tahun 2019 merupakan tingkat inflasi terendah selama kurun waktu 15 tahun, penurunan tersebut tidak memastikan bahwa tingkat investasi akan meningkat seperti halnya peningkatan inflasi tidak selalu mempengaruhi realisasi investasi seperti pada tahun 2016 dimana tingkat inflasi mengalami kenaikan, namun realisasi investasi turut mengalami peningkatan. Hal ini sangat signifikan jika dilihat pada peningkatan dari tahun sebelumnya jika disesuaikan dengan peningkatan inflasi. Inflasi yang terjaga seharusnya mendorong peningkatan investasi karena mencerminkan kestabilan harga dan risiko ekonomi yang lebih terkendali. Akan tetapi, pada kenyataannya, realisasi investasi justru mengalami peningkatan meskipun inflasi menunjukkan tren kenaikan. Inflasi dapat digunakan sebagai indikator utama dalam menilai suatu perekonomian dan menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu daerah. (Marsela, 2014).

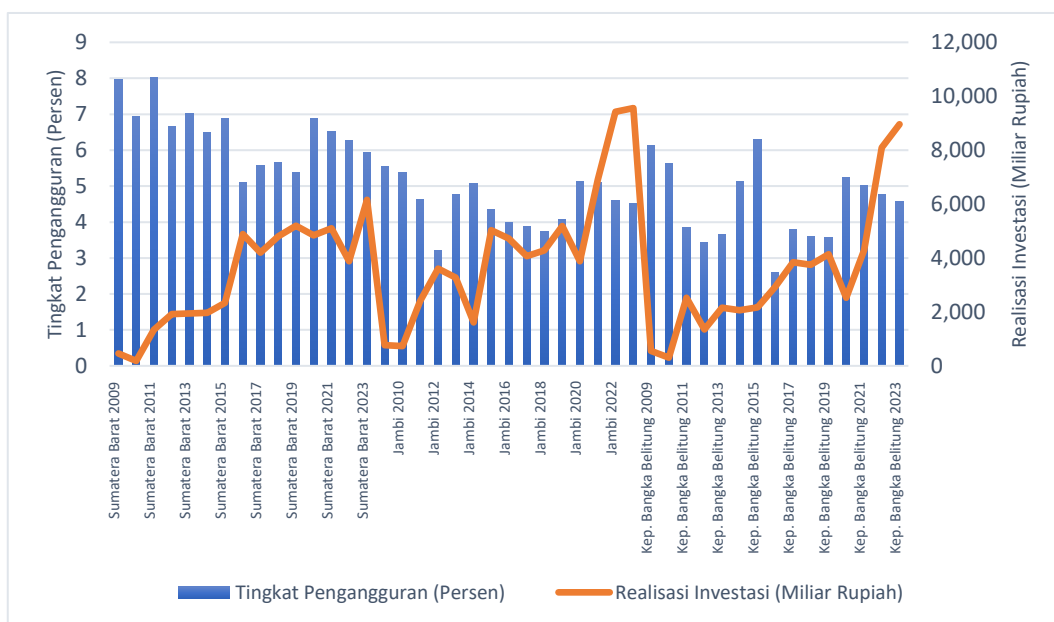


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 5. Grafik Upah Minimum Provinsi di Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023

Berdasarkan gambar 5, UMP pada ketiga provinsi tersebut selalu mengalami kenaikan namun terdapat stagnansi selama satu tahun di setiap provinsi. UMP cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kepulauan Bangka Belitung mencatat nilai UMP tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 3.498.479 Rupiah, sedangkan nilai UMP terendah pada tahun yang sama terdapat di Sumatera Barat sebesar 2.742.476 Rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan upah minimum antar provinsi yang cukup signifikan. Secara umum, seluruh provinsi dalam periode tersebut mengalami peningkatan UMP sejak tahun 2009. Misalnya, Jambi yang naik dari 800.000 Rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.943.033,08 Rupiah pada tahun 2023, Sumatera Barat yang meningkat dari 880.000 Rupiah pada tahun 2009 menjadi 2.710.493,93 Rupiah pada tahun 2023 dan Kepulauan Bangka Belitung meningkat dari 850.000 Rupiah menjadi 3.498.479 Rupiah. Kenaikan UMP tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan realisasi investasi. Daerah dengan UMP yang lebih rendah, seperti Jambi mampu menarik investasi dalam jumlah besar. Sebaliknya, provinsi dengan UMP yang lebih tinggi, seperti Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuasi tajam dalam realisasi investasinya.

Peningkatan UMP memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan. Dari sisi pekerja, kenaikan UMP berdampak langsung pada peningkatan daya beli, memperbaiki kesejahteraan, serta menjadi instrumen perlindungan sosial yang menjamin standar hidup layak. Namun, dari sisi pengusaha, peningkatan UMP dapat menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya beban biaya produksi sehingga mendorong perusahaan melakukan efisiensi, seperti pengurangan tenaga kerja atau penyesuaian struktur produksi. Secara makro ekonomi, kenaikan UMP yang terukur dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi jika kenaikan terjadi secara signifikan, justru berpotensi menghambat ekspansi usaha dan menekan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, penetapan UMP perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha agar tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Kenaikan UMP mungkin dapat menjadi beban tambahan bagi investor yang mempertimbangkan biaya tenaga kerja. Namun, kenaikan UMP disertai dengan meningkatnya produktivitas mampu memengaruhi keputusan investasi ke arah yang lebih positif (Nainggolan et al., 2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Gambar 6. Grafik Tingkat Pengangguran di provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023

Berdasarkan gambar 10, Tingkat Pengangguran di ketiga provinsi Sumatera mengalami fluktuasi. Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2011 dengan angka 8,02 persen. Secara umum, provinsi Sumatera Barat memperlihatkan tren penurunan dengan nilai 5,94 persen pada tahun 2023. Sementara tingkat pengangguran terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 dengan angka 2,6 persen, Jambi yang mayoritas menunjukkan tingkat pengangguran lebih rendah dibanding provinsi lain, meskipun sempat meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 5,13 persen. Meningkatnya tingkat pengangguran menandakan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran sering digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk program peningkatan investasi. Investasi berpengaruh pada jumlah tenaga kerja yang terserap, ketika tingkat investasi meningkat maka harga barang dan jasa di setiap sektor ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat (Hidayah & Aji, 2022).

Peningkatan Tingkat Pengangguran memberikan dampak yang cukup luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi suatu wilayah. Masalah pengangguran yang menyeluruh, baik pengangguran terbuka maupun terselubung menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang (Alghofari, 2010). Dari sisi ekonomi, kenaikan Tingkat Pengangguran mengindikasikan menurunnya efektivitas penyerapan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat menekan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Dari sisi sosial, peningkatan Tingkat Pengangguran seringkali memicu permasalahan lain seperti meningkatnya kemiskinan, menurunnya daya beli masyarakat, serta potensi bertambahnya beban pemerintah dalam menyediakan bantuan sosial. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, maka akan menimbulkan ketidakstabilan sosial akibat tingginya jumlah penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, pengendalian Tingkat Pengangguran melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi padat karya, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting agar keseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja dapat tercapai.

1.2. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam 10 provinsi yang mempunyai rerata realisasi investasi terendah selama periode tahun 2009 hingga 2023 di Indonesia sebelum adanya pemekaran wilayah di Papua menjadi enam provinsi pada tahun 2022. Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung secara rata-rata selama 2009 hingga 2023 menempati posisi 28, 25 dan 26 secara nasional. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung antara lain yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran. Berdasarkan data, ditemukan gap fenomena dari variabel-variabel tersebut. Fenomena ini salah satunya dapat dijelaskan melalui adanya peningkatan dan IPM pada tahun 2009 hingga 2023, tetapi realisasi investasi justru mengalami penurunan serta adanya penurunan tingkat inflasi disertai dengan penurunan tingkat realisasi investasi. Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023?
3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di atas, maka beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 - 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009- 2023.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009- 2023.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Realisasi Investasi di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2009 - 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai informasi tambahan dalam bidang penelitian sebagai bukti penerapan teori yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai kondisi Realisasi Investasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian bagi Pemerintah

Penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung dalam membentuk suatu kebijakan dan regulasi dalam mengatasi penerimaan Realisasi Investasi.

- b) Penelitian bagi Masyarakat dan Mahasiswa

Penelitian ini mampu digunakan sebagai upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan terhadap kondisi Realisasi Investasi saat ini sehingga mahasiswa dan masyarakat meningkat dapat mempersiapkan diri dalam berkontribusi membantu pemerintah untuk meningkatkan Realisasi Investasi.